

Universitas Padjajaran - Bandung  
H. Misbach

Manajemen Pembangunan Daerah Dalam Rangka Menyongsong  
Desentralisasi  
(Welcome Decentralization in Regional Management Development)

Semiloka Desentralisasi Fiskal di Indonesia  
(Indonesian Fiscal Decentralization Seminar)

Project 497-0357 / 104-000  
Strategic Objective 1  
ECG, USAID/Indonesia  
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)  
University of Maryland at College Park

June 19 – July 1, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).  
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of  
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.



# **M A K A L A H**

## **MANAJEMEN PEMBENGUNAN DAERAH DALAM RANGKA MENYONGSONG DESENTRALISASI**

*Oleh :*

**Drs. H. Misbach**

**IRIS**

**SEMILOKA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA**

*Kerjasama*

**Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran**

*dengan*

**IRIS, LPEM – UI, dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat**

**Bandung, 29 Juni – 1 Juli 2000**

**MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH  
DALAM RANGKA MENYONGSONG DESENTRALISASI  
(Berdasarkan UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999)**

Disampaikan pada Simulasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia  
Bandung, 29 Juni 2000

**I. PENDAHULUAN**

- Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat menuju kehidupan yang maju, mandiri, sejahtera, berdaya saing, berbudaya dan berkeadilan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
- Kebijakan pembangunan yang selama ini dilaksanakan secara terpusat (sentralistik) dan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, ternyata telah menjadi benih penyebab timbulnya krisis nasional berkepanjangan dan nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan.
- Dalam pelaksanaan otonomi daerah, misi yang akan dijalankan dalam pembangunan daerah adalah meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berasal dari pelayanan pemerintah, kapasitas sosial-ekonomi masyarakat, maupun ketersediaan sumber daya alam yang ada di daerah.
- Kinerja pembangunan daerah akan sangat bergantung pada kemampuan daerah itu sendiri dalam memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, khususnya menyangkut personal, pembiayaan dan peralatan yang tersedia.

## II. PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN DAERAH

- Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1974, *secara eksplisit dibedakan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan*. Sedangkan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah *sudah inklusif adanya tugas* (missi) untuk melaksanakan *pembangunan* dan membina kehidupan *kemasyarakatan*.
- Ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 telah mengubah pola penyelenggaraan pemerintahan, dari yang serba sentralistik (terpusat) kepada pola desentralisasi, dengan maksud agar dapat meningkatkan pelayanan publik dan sekaligus pemberdayaan masyarakat.
- Pembangunan daerah merupakan upaya terpadu yang menggabungkan dimensi kebijakan-kebijakan: a) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; b) perwujudan pemerintahan yang baik; c) kerjasama ekonomi antar wilayah/daerah dan keterkaitan ekonomi global; d) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; serta e) penanganan secara khusus daerah-daerah yang mempunyai masalah sosial ekonomi yang serius.
- Sejalan dengan jiwa dan semangat reformasi, maka paradigma baru pembangunan daerah ditetapkan dengan prinsip-prinsip demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, pemerataan dan keadilan, serta perluasan peranserta (pemberdayaan) masyarakat.
- Pada era otonomi daerah, kebijaksanaan pembangunan lebih dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan partisipasi masyarakat secara aktif dari mulai proses perencanaan sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawabannya.

- Sementara itu, peran pemerintah dalam proses pembangunan daerah tidak lagi bertindak sebagai penggerak (provider) atau pengayuh (rowing) tetapi lebih bersifat sebagai penyeimbang (enabler) atau pengendali/pengarah (steering).

### III. MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

- Sebagaimana halnya dalam proses manajemen secara umum, maka manajemen pembangunan daerah juga memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian/pengawasan.
- Dalam disiplin manajemen modern (management by objective) menekankan pada adanya *perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang cepat dan pengawasan yang ketat*, sehingga akan diperoleh hasil (dicapai tujuan) secara optimal.
- Dalam mengelola pembangunan daerah, terdapat siklus manajemen pembangunan sebagai satu kesatuan disiplin manajemen pembangunan daerah, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- Skala manajemen pembangunan daerah akan menjadi lebih luas dan mencakup semua urusan yang diserahkan kepada daerah, sejalan dengan adanya penyerahan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya.

- Persoalan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pembangunan daerah pada era otonomi daerah adalah menyangkut;
- a) apakah memiliki kebebasan relatif yang dapat diperjuangkan;
  - b) apakah memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan;
  - c) apakah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya;
  - d) apakah memiliki kemampuan untuk menggalang partisipasi publik (pemberdayaan masyarakat) dalam melaksanakan pembangunannya;
  - e) apakah memiliki akses yang luas untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerahnya.

#### IV. PENDEKATAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

- Pendekatan strategis (*strategic-fit*) yang dilakukan dalam manajemen pembangunan daerah harus dapat membangkitkan kinerja dan efektivitas suatu lembaga, dengan mempertimbangkan situasi yang kompetitif, budaya kerja terorganisir, strategi dan gaya manajemen. Suatu strategi hanya cocok untuk diberlakukan pada suatu gugus dari kondisi yang kompetitif. Demikian pula budaya kerja atau gaya manajemen yang khas hanya cocok untuk situasi strategi tertentu.
- Dalam memecahkan berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi di daerah, pendekatan perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan berdasarkan Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (PSD, Permendagri No. 9 Tahun 1982), dengan menggunakan pendekatan *Bottom-up Planning* yang dipadukan dengan *Top Down Policy*, nampaknya akan tetap relevan

untuk digunakan dalam proses perencanaan pembangunan pada era otonomi daerah.

- Apabila selama ini kebijaksanaan dari atas (top down policy) lebih dominan daripada perencanaan dari bawah (bottom up planning), maka dalam paradigma baru pembangunan daerah harus lebih mengutamakan perencanaan dari bawah.
- Demikian pula dalam pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan pembangunan daerah maka peran partisipasi masyarakat harus lebih diberdayakan, sehingga rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dari segenap lapisan masyarakat terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan akan benar-benar terwujud.
- Strategi pembangunan daerah dalam menjawab semua tantangan dan persoalan yang dihadapi, perlu dirumuskan lebih lanjut ke dalam program-program pembangunan daerah. Program-program pembangunan daerah yang akan disusun hendaknya telah menterpadukan berbagai kepentingan pembangunan, baik dalam rangka pembangunan sektor dan sub sektor maupun dalam rangka pengembangan wilayah.

#### IV. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAERAH

- Sejalan dengan nafas dan jiwa reformasi pembangunan daerah yang menuntut adanya demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, pemerataan dan keadilan, serta perluasan peranserta (pemberdayaan) masyarakat, maka hal-hal yang menjadi perhatian dalam manajemen pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- a) Pembangunan daerah hanya akan mencapai tujuannya secara optimal apabila dalam proses pelaksanaannya mendapatkan dukungan penuh dari partisipasi masyarakat
  - b) Dalam membangun proses partisipasi masyarakat, maka suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah adanya kesetaraan pelaku pembangunan (menghilangkan gap), sehingga masing-masing akan dapat memberikan kontribusi pemikirannya dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.
  - c) Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, harus dimulai dari sejak identifikasi permasalahan, pengambilan keputusan, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban masyarakat ini memiliki makna yang sangat luas dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan yang telah dapat dicapai.
  - d) Peran pemerintah dalam proses pembangunan daerah lebih ditekankan fungsinya sebagai fasilitator, mediator, pengendali dan penyeimbang pembangunan.
- Untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan, maka sedapat mungkin harus melibatkan berbagai lapisan masyarakat secara luas dalam keseluruhan proses pembangunan tersebut, terutama diawali dari proses pengambilan keputusan.
  - Semakin banyak orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan berarti semakin demokratis pula keputusan yang ditetapkan, serta akan memungkinkan pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan secara optimal.



## V. PENUTUP

- Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk didiskusikan lebih lanjut. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti kita akan memperoleh rumusan yang lebih baik bagi pelaksanaan manajemen pembangunan daerah.
- Diskusi ini akan menjadi sangat penting ketika kita pada saat ini dihadapkan pada berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan dengan kemampuan yang sangat terbatas.
- Terima kasih atas perhatiannya.

Sumedang, 29 Juni 2000

BUPATI SUMEDANG

DRS. H. MISBACH